

TESIS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

*Factors Affecting the Quality of Financial Reports with
Human Resource Competence as a Mediating Variable*

**SANO B PARIGI
A042221009**



PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

TESIS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

sebagai persyaratan memperoleh gelar MAGISTER Keuangan Daerah

Disusun dan diajukan oleh:

**SANO B PARIGI
A042221009**



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI MODERASI

Disusun dan diajukan oleh

SANO B PARIGI
A042221009

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
tanggal 18 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota



Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP 196406091992031003



Prof. Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP 196704141994121001

Ketua Program Studi Magister
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si
NIP 197209212006042001



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP 196402051988101001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sano B Parigi

NIM : A042221009

Program Studi : **Magister Keuangan Daerah (S2)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : **Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi**

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 Januari 2024

Yang menyatakan,




Sano B Parigi

PRAKATA



Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah *subhanahu watala'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Mediasi.”** Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., keluarga dan keturunannya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia. terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Aliong Mus ST. Bupati Pulau Taliabu yang memberikan izin dan dukungan kepada peneliti untuk melanjutkan studi Program Magister Keuangan Daerah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan Jenjang Magister di Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima peneliti untuk

mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;

4. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si., Ak., CA dan Bapak Prof. Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA, sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa;
5. Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M. Si, selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
6. Prof. Dr. Mediaty., SE., M.Si., Ak., CA, Prof. Dr Musran Munizu, SE., M.Si., CIPM dan Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., selaku Tim Penilai Tesis yang telah memberikan arahan dan masukan selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Keuangan Daerah yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih karena telah membimbing dan membagi ilmu selama peniliti menuntut ilmu dalam perkuliahan.
8. SEKDA Kabupaten Pulau Taliabu, Bapak Dr. Salim Ganiru. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2022, 2023 dan 2024, Bapak Irwan Mansur, SH., Bapak Abdul Kadir Nur Ali S.Sos., ME. dan Bapak Muh

Ridwan Azis, SE., ME., yg senantiasa selalu mendukung peneliti selama menempuh Pendidikan Magister Keuangan Daerah;

9. Teman-teman Kuliah Program Magister Keuangan Daerah yang senantiasa bersama sejak perkuliahan, penulisan proposal, dan penyelesaian tesis ini.
10. Keluarga saya tercinta, ayah, ibu, istri dan anak-anak tersayang yang selalu memberi dukungan dan doa. Terimakasih atas waktu yang di berikan;
11. Semua pihak yang turut terlibat dalam penelitian ini yang tidak sempat disebutkan Namanya satu persatu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, walau penelitian ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk penelitian di masa yang akan datang.

Makassar, 22 Januari 2024

Sano B. Parigi

ABSTRAK

SANO B. PARIGI. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Mediasi* (dibimbing oleh Arifuddin dan Syamsuddin).

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Studi ini dilakukan di Kabupaten Pulau Taliabu dengan populasi penelitian yaitu pegawai pemerintah di bidang akuntansi atau keuangan. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Kuesioner yang kembali dan siap diolah sebanyak 28 dengan tingkat pengembalian 100%. Model penelitian diuji secara empiris menggunakan model persamaan struktural (SEM) dengan SmartPLS sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan SAP dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun, audit internal dan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, kompetensi SDM terbukti secara empiris menjadi mediator antara hubungan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), teknologi informasi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan. Teori *stewardship* dan *goal setting* mempunyai peran penting dalam mendasari praktik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Implikasi penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu dalam merumuskan kebijakan dan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperbaiki reputasi serta kepercayaan masyarakat.

Kata kunci: kualitas laporan keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah, teknologi informasi, audit internal, komitmen organisasi, kompetensi SDM



ABSTRACT

SANO B. PARIGI. *Factors Affecting the Quality of Financial Reports with Human Resource Competence as a Mediating Variable* (supervised by Arifuddin dan Syamsuddin)

The research aims at providing the empirical evidence on the factors influencing the quality of the regional government financial reports. The research was conducted in Taliabu Island Regency, with government employees in the accounting or finance field the populations. The samples were selected using the purposive sampling technique, and questionnaire was used as the data collection instrument. As many as 82 questionnaires were returned and ready to be analysed, resulting in a 100% response rate. The research model was empirically tested using the structural equation modelling (SEM) with SmartPLS as the analysis tool. The research result indicates that the Government Accounting Standards (SAP) and the organizational commitment have the significant and positive effect on the quality of the financial reports. However, the internal audit and information technology have no significant influence on the quality of the financial reports. Moreover, the human resource competence is empirically proven to mediate the relationship between the SAP, information technology, organizational commitment on the quality of the financial reports. The stewardship theory and goal setting theory have the important role in the underlying regional government transparency and accountability in the public resource management. The results of this study should be used as the basis of thought and study to determine the factors affecting the quality of regional government financial reports. The implications of this study can assist the regional government of Taliabu Island Regency in formulating the policies and actions to improve the quality of the financial reports and enhance the reputation and trust of the community.

Keyword: quality of financial reporting, government accounting standard (GAS), information technology, organizational commitment, internal audit, human resource competence



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PEGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Kegunaan Penelitian.....	16
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
1.6. Definisi dan Istilah.....	17
1.7. Sisematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep.....	19
2.1.1. Teori <i>Stewardship</i>	19
2.1.2. Teori penetapan tujuan (<i>Goal Setting Theory</i>).....	21
2.1.3. Laporan Keuangan Daerah.....	23
2.1.4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	35
2.1.5. Teknologi Informasi.....	37
2.1.6. Peran Audit Internal.....	39
2.1.7. Komitmen Organisasi.....	42
2.1.8. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).....	44
2.2. Tinjauan Empiris.....	46

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	48
3.1. Kerangka Konseptual	48
3.2. Hipotesis	51
3.2.1. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.....	51
3.2.2. Teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.....	52
3.2.3. Audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	53
3.2.4. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.....	54
3.2.5. Kompetensi sumber daya manusia memediasi pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.....	56
3.2.6. Kompetensi sumber daya manusia memediasi pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	57
3.2.7. Kompetensi sumber daya manusia memediasi pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	59
3.2.8. Kompetensi sumber daya manusia memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	61
BAB IV METODE PENELITIAN.....	63
4.1. Rancangan Penelitian.....	63
4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	64
4.3. Populasi dan Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	64
4.4. Jenis dan Sumber Data	65
4.5. Metode Pengumpulan Data	65
4.6. Variabel Penelitian	65
4.6.1. Variabel Independen (Eksogen)	65
4.6.2. Variabel Mediasi atau Intervening	66
4.6.3. Variabel Dependen (Endogen)	66
4.7. Definisi Operasional.....	66
4.7.1. Standar akuntansi pemerintah (X_1).....	69
4.7.2. Teknologi Informasi (X_2).....	69
4.7.3. Peran audit internal (X_3)	69
4.7.4. Komitmen organisasi (X_4).....	69
4.7.1. Variabel mediasi/intervening (Y_1)	70

4.7.2. Variabel Terikat (<i>Dependent</i>).....	70
4.8. Instrumen Penelitian	71
4.9. Teknik Analisis Data	71
4.9.2. Analisis Structural Equation Model (SEM)	72
4.9.5. Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	76
4.9.6. Uji Hipotesis	77
4.9.7. Analisis SEM dengan Efek Mediasi.....	78
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	80
5.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	80
5.1.1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	82
5.1.2. Analisis Deskriptif Variabel Eksogen	82
5.1.3. Analisis Deskriptif Variabel Mediasi.....	86
5.1.4. Analisis Deskriptif Variabel Endogen	87
5.2. Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	88
5.2.1. <i>Convergent Validity</i>	90
5.2.2. <i>Discriminant Validity</i>	92
5.2.3. <i>Composite Reliability</i>	94
5.2.4. <i>Convergent Validity</i> setelah Modifikasi.....	94
5.2.5. <i>Loading factor</i> setelah Modifikasi	97
5.3. Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	97
5.4. Uji Hipotesis	99
5.4.1. Uji Efek Mediasi	101
5.4.2. <i>Specific Indirect Effect</i>	105
5.5. Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.....	108
5.6. Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.....	110
5.7. Audit Internal Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.....	112
5.8. Komitmen Organisasi Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.....	114
5.9. Kompetensi SDM memediasi pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu	116
5.10. Kompetensi SDM memediasi pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.....	117

5.11. Kompetensi SDM memediasi pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu	118
5.12. Kompetensi SDM memediasi pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.....	119
BAB VI PENUTUP.....	121
6.1. Kesimpulan	121
6.2. Keterbatasan.....	124
6.3. Saran.....	126
6.4. Implikasi	127
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN	138
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	138
Lampiran 2. Data Penelitian.....	138
Lampiran 3. Statistik Deskriptif	138
Lampiran 4. <i>Construct Validity and Reliability</i>	138
Lampiran 5. <i>Path Coefficient</i>	138
Lampiran 6. <i>Total Effect</i>	138

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2019-2022	3
Tabel 1. 2 Definisi dan istilah	17
Tabel 4. 1 Kriteria Pemilihan Sampel	64
Tabel 4. 2 Definisi Operasional Variabel	67
Tabel 5. 1 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	80
Tabel 5. 2 Karakteristik Responden	81
Tabel 5. 3 Statistik Deskriptif Variabel Standar Akuntansi Pemerintah.....	83
Tabel 5. 4 Statistik Deskriptif Variabel Teknologi Informasi.....	84
Tabel 5. 5 Statistik Deskriptif Variabel Audit Internal.....	85
Tabel 5. 6 Statistik Deskriptif Variabel Komitmen Organisasi.....	85
Tabel 5. 7 Statistik Deskriptif Variabel Kompetensi SDM	86
Tabel 5. 8 Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Keuangan Daerah	87
Tabel 5. 9 <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	91
Tabel 5. 10 <i>Cross Loading Factor</i>	92
Tabel 5. 11 <i>Composite Reliability</i>	94
Tabel 5. 12 <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> setelah Modifikasi	95
Tabel 5. 13 <i>Loading Factor</i> setelah Modifikasi	97
Tabel 5. 14 <i>R-Square (R2)</i>	98
Tabel 5. 15 Hasil Uji Hipotesis	100
Tabel 5. 16 <i>Indirect Effect</i>	102
Tabel 5. 17 <i>Path Coefficient</i>	103
Tabel 5. 18 <i>Total Effects</i>	104
Tabel 5. 19 <i>Specific Indirect Effects</i>	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual Penelitian	50
Gambar 5. 1 Model Pengukuran	89
Gambar 5. 2 Model Pengukuran setelah Modifikasi	96

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan tata kelola lembaga pemerintah yang baik menjadi kunci penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia telah menghasilkan serangkaian peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Nirwana & Haliah, 2018). Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menjadi alat evaluasi kinerja. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan pernyataan akuntabilitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, beberapa undang-undang seperti Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 9 Tahun 2015 (jo. UU No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur pengelolaan keuangan pemerintah dengan prinsip

akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Selanjutnya, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No.13 Tahun 2019 (jo. No. 6 Tahun 2008) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keandalan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan tersebut dalam rangka reformasi dengan tujuan yang sangat penting. Tujuan utama dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Badjuri & Trihapsari, 2004). Badjuri & Trihapsari (2004) juga menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah Indonesia mendorong pengelolaan keuangan yang baik dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja tidak hanya mencakup kinerja individu, tetapi juga kinerja unit, lembaga, dan pemerintah secara keseluruhan. Penting bagi pemerintah daerah untuk menerapkan tata kelola lembaga yang baik dalam pengelolaan keuangan untuk memastikan kinerja keuangan yang optimal serta memenuhi

tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik (Adiputra et al., 2018). Laporan keuangan yang berkualitas tinggi tidak hanya memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingan.

Di Indonesia, khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, kualitas laporan keuangan daerah tersebut masih rendah. Kualitas laporan keuangan ditunjukkan dengan laporan hasil audit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) sejak diberlakukannya basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan, yakni pada tahun 2019-2020. Adapun laporan hasil audit Kabupaten Pulau Taliabu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2019-2022

Tahun	OPINI BPK RI
2019	TMP
2020	TMP
2021	WDP
2022	WDP

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2022.

Pada tahun 2019 dan 2020, BPK menolak untuk memberikan pendapat (Tidak Memberikan Pendapat/TMP). TMP mengindikasikan ketidaklengkapan bukti atau informasi untuk menilai kredibilitas laporan keuangan. Pada tahun 2021 dan 2022, BPK mengeluarkan opini WDP. Menurut Lestari (2020: 44), opini WDP berarti terdapat pengecualian dampak hal-hal untuk komponen-komponen tertentu, misalnya laporan keuangan

sebagian kecil (tidak material) disusun tidak memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku atau ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi.

Berdasarkan pada opini BPK atas laporan keuangan daerah Kabupaten Pulau Taliabu selama empat terakhir, mengindikasikan bahwa laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang rendah. Kualitas laporan keuangan merujuk pada sejauh mana laporan keuangan mencerminkan informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan akurat (Saha, 2022) mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, dan perubahan ekuitas (Alsmady, 2022). Laporan keuangan yang berkualitas tinggi harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku, prinsip-prinsip akuntansi yang konsisten, serta kebijakan dan pedoman pelaporan yang relevan (Nirwana & Haliah, 2018).

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penyajian LKPD harus mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur oleh PP No. 24 Tahun 2005. Tujuan diberlakukannya ketentuan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah (Sylvia *et al.*, 2018).

Hal ini disebabkan karena laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan menjadi dasar bagi beberapa pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam LKPD harus memiliki manfaat dan relevansi sesuai dengan kebutuhan para pengguna informasi. Huang *et al.*, (2005) menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat jika mampu mendukung

pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan untuk memberikan perhatian khusus terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Pemerintah daerah dalam kerangka teori *stewardship* merupakan penyedia layanan untuk memenuhi kepentingan masyarakat (Bebbington & Rubin, 2022). *Stewardship theory* menunjukkan bahwa dengan adanya keselarasan tujuan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan berkembang dan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan (Bjurstrøm, 2020). Laporan keuangan, dalam hal ini, merupakan upaya pemerintah sebagai *steward* (pelayan publik) untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penyusunan laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Akuntansi pemerintahan di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan dan terus berkembang hingga saat ini (Bookey et al., 2018). Peraturan yang berbeda disahkan pada periode yang berbeda, mengikuti kebutuhan pengguna informasi. Bentuk modern akuntansi pemerintahan muncul antara tahun 1921 dan 1926, dan membutuhkan lima dekade untuk mengintegrasikan dengan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (*International Public Sector Accounting Standards*). Pada tahun 1973, standar akuntansi Indonesia sebagian besar mengadopsi US GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) hingga tahun 1994. Pada tahun 2000, terjadi revolusi ketiga pada laporan akuntansi. Keputusan Presiden No.

17/2000 mewajibkan seluruh lembaga pemerintah untuk menyampaikan realisasi anggaran dan neraca. Pemerintah juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dengan mengeluarkan UU No. 105/2000 yang mewajibkan semua lembaga pemerintah daerah untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban, catatan keuangan, arus kas dan neraca.

Pada tahun 2003 – 2015, Indonesia mengkonvergensi standar akuntansi dengan standar internasional. Melalui PP No.24/2005, pemerintah secara resmi menerbitkan standar akuntansi pemerintah yang dikenal sebagai SAP, yang juga berlaku untuk pemerintah daerah. Standar ini didasarkan pada system akrual untuk menyelaraskan dengan standar internasional. Menurut Harun *et al.* (2020) terdapat banyak hambatan dalam penerapan sistem akrual. Mereka mengacu pada tiga hambatan utama, yaitu masalah penetapan standar, masalah hukum, dan kurangnya kemauan politik. Mengenai pengaturan standar, masalahnya adalah badan pengaturan standar. Sejak 1 Januari 2015, pemerintah daerah harus membuat laporan keuangan dengan basis akrual penuh.

SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010, tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Apabila informasi yang terdapat dalam LKPD memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah, sebagaimana disyaratkan dalam PP 71 Tahun 2010,

maka hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Mahardini & Miranti (2018), penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum juga mempunyai kemampuan prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan (Boolakya *et al.*, 2018).

Saat ini, *Elektronik Government (e-Government)* merupakan bagian integral dari infrastruktur pemerintah dan merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap negara di dunia (Bougherra *et al.*, 2022). Revolusi teknologi dan perkembangan internet menjadi pencetus peralihan transaksi pemerintah yang berbasis kertas menjadi format elektronik. E-government dan teknologi informasi mempunyai potensi untuk mengubah hubungan pemerintah dengan masyarakat dengan meningkatkan transparansi publik. Bougherra *et al.* (2022) mengemukakan bahwa penggunaan teknologi pada era *e-Government* mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah dan pembangunan nasional maupun regional. Stier (2017) menambahkan bahwa manfaat ekonomi dari teknologi lebih besar dari risiko demokratisasi.

Aldino & Septiano (2021) menyatakan bahwa dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan juga dukungan dari teknologi informasi yang memadai. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama yang memengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. Seperti yang

diketahui, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Rifandi, 2018).

Penggunaan komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem informasi akuntansi. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Penelitian yang dilakukan oleh Rifandi (2018), Baturante *et al.*, (2018), Sundari *et al.*, (2018) dan Aldino & Septiano (2021) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain itu, dalam menerapkan akuntabilitas publik sangat diperlukan peranan audit internal. Audit internal merupakan aktivitas yang independen, penilaian objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan dengan independen dan objektif yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak

maupun dalam pelaksanaan audit. Audit internal harus bebas dari hambatan dalam menjalankan tugasnya. Tugas dari audit internal adalah untuk membantu organisasi meningkatkan pengendalian internal perusahaan, termasuk pengendalian atas penjualan, membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab, dan pendapat yang objektif mengenai kegiatan yang telah diperiksa. *The institute of international auditors* (IIA) mendefinisikan audit internal sebagai berikut:

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes”.

Fungsi Audit Internal di pemerintah Indonesia dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP. APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Adiputra *et al.* (2018) dan Putri M & Triandi T (2020) menyatakan bahwa peran audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, diperlukan juga dukungan dari faktor perilaku seperti komitmen dan sumber daya yang terlibat untuk mendukung manajemen puncak, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Menurut Hahn *et al.*, (1992), salah satu metode untuk meningkatkan pengolahan informasi adalah dengan meningkatkan tingkat keterlibatan anggota. Salah satu alternatif untuk meningkatkan keterlibatan anggota dalam organisasi adalah dengan meningkatkan komitmen

organisasional mereka. Orang dengan komitmen yang tinggi lebih bersedia meluangkan waktu untuk memproses informasi (Schick *et al.*, 1990).

Komitmen organisasi mencerminkan tingkat keterlibatan seseorang dalam suatu bagian organisasi (Vandenberg, 1992). Komitmen organisasi dibangun berdasarkan kepercayaan pekerja terhadap nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja untuk membantu mencapai tujuan organisasi, dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Hal ini menjelaskan bahwa komitmen organisasi mencerminkan kekuatan relatif dari identifikasi individu dan keterlibatan dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi pekerja terhadap organisasi. Jika pekerja merasa terikat dengan nilai-nilai organisasional, mereka akan merasa senang bekerja, memiliki tanggung jawab, kesadaran dalam menjalankan tugas organisasi, serta termotivasi untuk melaporkan semua aktivitas, termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan secara sukarela kepada publik. Penelitian yang dilakukan oleh Iminanda *et al.*, (2018), Tampubolon *et al.*, (2018), dan Mariana & Basid, (2019) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Mereka perlu memiliki pemahaman dan kompetensi dalam bidang akuntansi pemerintahan keuangan daerah, serta pengetahuan tentang organisasi pemerintahan. Jika orang yang bertanggung jawab atas pembuatan laporan

keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, hal ini dapat menjadi kendala bagi aparat daerah dalam menyajikan laporan keuangan.

Oleh sebab itu, untuk mencapai pengelolaan laporan keuangan daerah yang baik, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Mereka diharapkan dapat memahami logika akuntansi dengan baik. Selain memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, juga penting untuk mengikuti berbagai pelatihan terkait penyusunan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bertujuan agar kekeliruan dalam penyusunan pelaporan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dapat dihindari.

Penelitian yang dilakukan oleh Afri & Rizki (2018) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Emilda Nur dan Safiri *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Luky *et al.*, (2020) meneliti tentang pengaruh komitmen organisasi, pelaksanaan anggaran dan implementasi sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan. Nur (2021)

menunjukkan bahwa SAP, peran audit internal, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nirwana & Haliah (2018) dengan mengambil variabel faktor internal yaitu kompetensi SDM; Afri & Rizki (2018) dengan mengambil variabel kompetensi SDM; Aldino & Septiano (2021) dengan mengambil variabel teknologi informasi; Luky *et al.*, (2020) dengan mengambil variabel komitmen organisasi; dan Furqan *et al.* (2020) dengan mengambil variabel audit internal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu kompetensi SDM dijadikan sebagai variabel mediasi. Variabel mediasi memberikan penjelasan teoritis mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan mengidentifikasi mekanisme atau proses yang mendasari yang menghubungkan kedua variabel tersebut. Variabel mediasi juga memungkinkan peneliti untuk menguji mekanisme yang melaluinya variabel independen memengaruhi variabel dependen, sehingga memberikan wawasan tentang bagaimana intervensi dapat dikembangkan untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kualitas laporan keuangan dengan judul “faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel mediasi di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara”.

1.2. Rumusan Masalah

Kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Pulau Taliabu yang masih rendah merupakan masalah yang diangkat pada penelitian ini, sehingga peneliti mencoba untuk mengkaji dan memprediksi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan di Kabupaten Pulau Taliabu. Kinerja keuangan daerah tidak terlepas dari tata kelola keuangan dan kekayaan daerah yang diatur dalam PP No.12/2019 (jo. PP mo.58/2005) tentang pengelolaan keuangan daerah. Regulasi ini mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Teori *stewardship* mendalilkan bahwa pemerintah sebagai penyedia layanan publik (*steward*) menjalankan tugas dan kewajibannya untuk menjaga kepercayaan publik (Bjurstrøm, 2020). Teori *stewardship* merupakan pendekatan dalam pengelolaan sumber daya yang menekankan pada tanggung jawab pemerintah atau organisasi publik untuk mengelola aset publik dengan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Ketika teori *stewardship* diterapkan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, maka hal ini akan mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Teori *goal setting* menekankan pentingnya penetapan tujuan.

Menetapkan tujuan yang spesifik dan dapat diukur dapat memotivasi seseorang atau organisasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu?
2. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu?
3. Apakah audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu?
5. Apakah kompetensi SDM dapat memediasi pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu?
6. Apakah kompetensi SDM dapat memediasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu?
7. Apakah kompetensi SDM dapat memediasi pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu?
8. Apakah kompetensi SDM dapat memediasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di kemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Komitmen Organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
5. Mengidentifikasi dan menganalisis apakah kompetensi SDM dapat memediasi pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
6. Mengidentifikasi dan menganalisis apakah kompetensi SDM dapat memediasi pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
7. Mengidentifikasi dan menganalisis apakah kompetensi SDM dapat memediasi pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

8. Mengidentifikasi dan menganalisis apakah kompetensi SDM dapat memediasi pengaruh peran komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal menambah literatur dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan menambah referensi penelitian di sektor publik.

- b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui penyusunan laporan keuangan yang andal.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada OPD Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Adapun yang diteliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas

laporan keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai pemoderasi pada OPD Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara.

1.6. Definisi dan Istilah

Adapun definisi dan istilah dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 2
Definisi dan istilah

No	Istilah	Definisi
1	Standar akuntansi pemerintahan (SAP)	Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
2	Teknologi Informasi	Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer untuk memperoleh, memproses dan menyimpan informasi yang berkualitas juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi.
3	Audit internal	Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang independen dalam organisasi untuk meninjau kembali operasi sebagai jasa yang diberikan kepada manajemen.
4	Komitmen Organisasi	Komitmen organisasi adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan sasaran organisasi.
5	Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	Kompetensi adalah sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja.
6	Kualitas Laporan Keuangan	Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat dipahami oleh pemakai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari enam bab. Bab satu menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup, definisi dan istilah serta sistematika penulisan. Bab dua berisi tentang berbagai kajian teoritis dan empiris yang relevan

dengan topik penelitian ini. Bab tiga membahas tentang kerangka konseptual penelitian serta hipotesis penelitian. Bab empat menjelaskan metodologi penelitian yang berisi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian dan teknik analisis data. Bab lima membahas hasil penelitian dan pembahasan. Bab enam adalah penutup, membahas kesimpulan, keterbatasan, serta saran dan rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Teori *Stewardship*

Grand theory yang mendasari penelitian ini merupakan bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory*. *Stewardship theory* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991: 49). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan antara organisasi pemerintah dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mensejahterakan masyarakat. *Stewardship theory* atau disebut dengan teori pengabdian atau pelayanan yaitu merupakan teori yang didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai good steward yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab.

Teori *stewardship* adalah teori yang sesuai dengan penelitian ini dimana manfaat teori *stewardship* yaitu pemerintah akan berusaha meningkatkan akuntabilitas dan transparansi informasi agar berkualitas guna menjaga kepercayaan publik. Pemerintah yang bertindak sebagai pelayan publik (*steward*) mempunyai kewajiban menyajikan informasi

yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

UU No. 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat. Pemerintah daerah selaku manajer wajib memberikan laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam APBD kepada rakyat dalam bentuk LKPD yang telah diaudit oleh BPK. Berdasarkan teori *stewardship* ini, kinerja kepala daerah akan dinilai dalam laporan pertanggungjawabannya kepada DPRD tentang keberhasilan program dan kebijakannya yang tercermin pada realisasi APBD serta opini BPK atas LKPD yang diperoleh pemerintah daerah.

Dalam teori *stewardship*, manajer akan menampilkan perilaku yang sesuai bagi kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, maka steward akan mengalah dan berusaha bekerja sama daripada menentangnya karena steward merasa kepentingan bersama serta berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional dan steward lebih mementingkan usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu, teori *stewardship* ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Teori ini sangat cocok diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi publik dimana steward diposisikan sebagai pemerintah daerah dan principal sebagai publik serta para pengambil keputusan. Dalam hal ini kualitas laporan

keuangan yang akan digunakan oleh publik dan para pengambil keputusan.

2.1.2. Teori penetapan tujuan (*Goal Setting Theory*)

Goal setting theory yang dikembangkan oleh Locke sejak 1979 telah mulai menarik minat dalam berbagai masalah dan isu organisasi. Menurut *goal setting theory*, individu memiliki beberapa tujuan, memilih tujuan, dan mereka termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Teori ini mengasumsikan bahwa faktor utama yang memengaruhi pilihan yang dibuat individu adalah tujuan yang mereka miliki. *Goal setting theory* telah menunjukkan adanya pengaruh signifikan dalam perumusan tujuan (Arsanti, 2009). Kekhususan dan kesulitan merupakan atribut dari penetapan tujuan. Umumnya, semakin sulit dan spesifik tujuan yang ditetapkan, semakin tinggi tingkat prestasi yang akan dihasilkan.

Salah satu karakteristik dari *goal setting theory* adalah tingkat kesulitan tujuan. Tingkat kesulitan tujuan yang berbeda akan memberikan motivasi yang berbeda bagi individu untuk mencapai kinerja tertentu. Tingkat kesulitan tujuan yang rendah akan membuat individu memandang bahwa tujuan sebagai pencapaian rutin yang mudah dicapai sehingga akan menurunkan motivasi individu untuk berkeaktifan dan mengembangkan kemampuannya. Sedangkan pada tingkat kesulitan tujuan yang lebih tinggi tetapi mungkin untuk dicapai, individu akan termotivasi untuk berfikir cara pencapaian tujuan tersebut.

Proses ini akan menjadi sarana berkembangnya kreativitas dan kemampuan individu untuk mencapai tujuan tersebut.

Goal setting theory atau teori penetapan tujuan adalah proses kognitif membangun tujuan dan merupakan determinan perilaku. Prinsip dasar *goal setting theory* adalah *goals* dan *intentions*, yang keduanya merupakan penanggung jawab untuk human behavior. Dalam studi mengenai *goal setting*, *goal* menunjukkan pencapaian standar khusus dari suatu keahlian terhadap tugas dalam batasan waktu tertentu. *Harder goal* akan dapat tercapai bila ada usaha dan perhatian yang lebih besar dan membutuhkan lebih banyak *knowledge* dan *skill* dari pada *easy goal*.

Mengacu pada Locke's model (Arsanti, 2009), *goal setting theory* atau teori penetapan tujuan mempunyai empat mekanisme dalam memotivasi individu untuk mencapai kinerja. Pertama, penetapan tujuan dapat mengarahkan perhatian individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Kedua, tujuan dapat membantu mengatur usaha yang diberikan oleh individu untuk mencapai tujuan. Ketiga, adanya tujuan dapat meningkatkan ketekunan individu dalam mencapai tujuan tersebut. Keempat, tujuan membantu individu untuk menetapkan strategi dan melakukan tindakan sesuai yang direncanakan. Dengan demikian, dengan adanya penetapan tujuan dapat meningkatkan kinerja individu yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Komitmen harus ada dalam *goal setting*. Komitmen terhadap *goal* nampak secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada *performance*. Bila *person's goal* tinggi, maka *high commitment* akan membawa pada *higher performance* dibandingkan ketika *low commitment*. Tetapi, bila *goals* rendah, *high commitment* membatasi *performance*. Jika *goal commitment* berdampak pada proses *goal setting* yang akan berkurang bila ada *goal conflict*. *Goal commitment* berhubungan positif dengan *goal directed behavior*, dan *goal directed behavior* berhubungan positif dengan *performance*.

2.1.3. Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan PP No. 71/2010, laporan keuangan merupakan laporan berstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu pelaporan. Menurut PP No. 8/2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Sedangkan menurut Bastian (2010: 9) laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Mahmudi (2011: 143) laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Laporan keuangan yaitu suatu proses akuntansi yang berstruktur

mengenai laporan posisi keuangan dalam suatu periode akuntansi, laporan keuangan harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan berguna bagi pihak-pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.1.3.1. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Menurut PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Kesimpulan dari tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan dan menyediakan informasi yang digunakan dalam pembuatan suatu keputusan dan berguna untuk kelangsungan suatu entitas atau suatu pemerintahan daerah.

2.1.3.2. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2010) komponen laporan keuangan sektor publik adalah :

1. Laporan posisi keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca atau laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan

keuangan yang menyajikan posisi aktiva utang dan modal pemilik selama suatu periode tertentu. Laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos sebagai berikut :

- a. Properti, pablik dan peralatan;
- b. Aktiva tidak berwujud;
- c. Aktiva keuangan (selain butir d, f dan h);
- d. Investasi yang diperlukan dengan metode ekuitas;
- e. Persediaan;
- f. Pemulihan transaksi non pengukuran, termasuk pajak dan transfer;
- g. Piutang dari transaksi pertukaran;
- h. Kas dan setara kas;
- i. Utang pajak dan transfer;
- j. Utang karena transaksi penukaran;
- k. Cadangan (provision);
- l. Kewajiban tidak lancar;
- m. Partisipasi minoritas;
- n. Aktiva/ekuitas neto

2. Laporan kinerja keuangan (laporan surplus-defisit)

Laporan kinerja keuangan atau disebut juga dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan surplus-rugi, laporan operasi, laporan surplus-defisit atau laporan laba rugi, adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan

biaya selama satu periode tertentu. Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut ini:

- a. Pendapatan dari aktivitas operasi
- b. Surplus atau defisit dari kativitas operasi
- c. Biaya keuangan (biaya pinjaman)
- d. Surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas
- e. Surplus atau defisit dari aktivitas biasa
- f. Pos-pos luar biasa
- g. Saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto
- h. Surplus atau defisit neto untuk periode

3. Laporan perubahan aktiva (Ekuitas neto)

Laporan perubahan aktiva (ekuitas neto) menggambarkan kenaikan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam suatu laporan keuangan. Perubahan ekuitas neto secara keseluruhan menyajikan total surplus/defisit neto selama satu periode. Pendapatan dan biaya lainnya diakui secara langsung sebagai perubahan aktiva/ekuitas neto dari setiap kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan aktiva ekuitas neto meliputi sebagai berikut :

- a. Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
- b. Saldo akumulasi surplus dan defisit pada awal periode, pada tanggal pelaporan dan pergerakan selama periode.
- c. Pengungkapan komponen asset/ekuitas neto secara terpisah dan rekonsiliasi antara nilai tercatat setiap komponen asset/ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pembiayaan, dan kegiatan investasi, informasi arus kas sangat bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar estimasi, kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut.

5. Catatan atas laporan keuangan sektor publik

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan

keuangan bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan.

Sedangkan menurut PP No. 71/2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ini menyajikan semua informasi kenaikan ataupun penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca merupakan gambaran posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperbaiki, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa baik masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2) Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

3) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Laporan Operasional (LO)

Laba Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laba operasional terdiri dari :

1) Pendapatan laba operasional (LO)

Merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih suatu pemerintahan.

2) Beban

Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

3) Transfer

Transfer merupakan penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari atau oleh suatu entitas pelaporan dari atau oleh entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4) Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi uang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat maupun daerah selama periode tertentu. Laporan arus kas terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau perincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dari beberapa pendapat tentang komponen laporan keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang lebih terhadap komponen-komponen laporan keuangan ini sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Laporan keuangan dibuat untuk menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, maka dari itu memahami tujuan dan manfaat setiap komponen-komponen laporan keuangan sektor publik sangat penting dilakukan.

2.1.3.4. Kualitas Laporan Keuangan

Definisi kualitas menurut Mulyana (2010) adalah kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi juga dapat dipahami oleh pemakai informasi.

Menurut Defitri (2016) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan PP No. 71/2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat dipahami oleh pemakai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

Adapun Indikator Laporan Keuangan PP No. 71/2010, yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat di verifikasi.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAP ditetapkan dengan PP No. 71/2010 sebagai pengganti PP No. 24/2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan pemerintah ini meliputi SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual.

Menurut Peraturan PP No. 71/2010 pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Afiah & Nunuy (2009) akuntansi pemerintahan memiliki tujuan adalah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Fungsi akuntabilitas lebih luas dari pada sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Tujuan utama akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan.

b. Manajerial

Selain tujuan akuntabilitas, akuntansi pemerintah menyediakan informasi keuangan bagi pemerintah untuk melakukan fungsi manajerial. Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintahan untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomi.

c. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan diadakan untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

2.1.5. Teknologi Informasi

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer untuk memperoleh, memproses dan menyimpan informasi yang berkualitas juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000).

Penjelasan PP No. 56/2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan pemerintah pusat dan pemda berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi

untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi, utamanya tentang sistem informasi akuntansi keuangan daerah.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan sistem informasi yang mampu menangani proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi pemerintah yang menetapkan suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah.

UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai PP No. 71/2010. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai serta pembelajaran terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat memahami dan melaksanakan sistem yang baru dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.

Menurut Halim (2007), akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu subsistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan kinerja pemerintah daerah.

2.1.6. Peran Audit Internal

Audit internal atau Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern didefinisikan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Menurut Commitee of American Institute of Accountant (AICPA) yang dikutip Bastian (2010) menjelaskan pengendalian intern sebagai rencana organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinasi yang dianut oleh perusahaan untuk melindungi harta, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang independen dalam organisasi untuk meninjau kembali operasi sebagai jasa yang diberikan kepada manajemen. Menurut Mulyadi (2002), internal audit adalah auditor yang bekerja di dalam suatu entitas atau perusahaan yang bertugas untuk mengetahui apakah prosedur serta kebijakan yang sudah disusun dan diterapkan oleh manajemen yang telah dipatuhi, menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi serta prosedur aktivitas kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang telah dihasilkan oleh bagian-bagian dari entitas atau organisasi.

Audit internal bertujuan untuk membantu entitas organisasi supaya bisa melaksanakan tanggung jawab dengan efektif. Audit internal akan menganalisis, mengajukan beberapa saran dan penilaian. Pemeriksaan juga mencakup pengawasan efektif dengan biaya yang wajar. Tujuan utama dari audit internal adalah membantu pemerintah

daerah dan satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Dalam penyusunan laporan keuangan peran audit internal sangat diperlukan dalam membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya dengan menganalisis, menilai dan memberi saran serta komentar tentang aktivitas yang diperiksa dalam pembuatan laporan keuangan. Dengan demikian peran audit internal sangat perlu demi menjamin kualitas laporan keuangan yang diinginkan.

Menurut Adi & Amri Setyo (2013), audit internal tidak diperkenankan untuk menerima tanggung jawab atas fungsi-fungsi atau tugas-tugas non audit yang secara periodik menjadi objek penelitian audit internal. Peran audit internal dapat dilihat sebagai nilai tambah dalam meningkatkan efektivitas dari tata kelola organisasi pemerintahan. Auditor internal senantiasa berusaha untuk

menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan yang semakin kompleks.

Internal auditing merupakan suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal auditing membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

2.1.7. Komitmen Organisasi

Komitmen Organisasi (*Organizational Commitment*) didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut, memiliki kemauan untuk mengerahkan usaha yang kuat atas nama organisasi, dan keyakinan yang dalam penerimaan nilai dan tujuan organisasi. (Luthans, 2011).

Kreitner *et al.*, (2014) mengatakan secara pemahaman umum arti kata dari Komitmen adalah sebuah kesetujuan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, orang lain, kelompok atau organisasi. Sedangkan Komitmen Organisasi mencerminkan tingkatan dimana seseorang mengenali sebuah organisasi dan terikat pada tujuan-tujuannya. Komitmen organisasi terdiri atas tiga komponen terpisah yang saling berhubungan sebagai berikut:

- a) Komitmen Afektif, merupakan pelekatan emosi pegawai pada, identifikasi pegawai dengan, dan keterlibatan pegawai dalam Perusahaan.
- b) Komitmen Normatif, mencerminkan rasa tanggung jawab untuk terus bekerja.
- c) Komitmen berkelanjutan, merupakan kesadaran akan kerugian karena meninggalkan perusahaan.

Komitmen organisasi bisa menjadi salah satu faktor yang diduga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasional merupakan keinginan kuat sebagai anggota organisasi mengikuti arah, tujuan organisasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa komitmen organisasional dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Jika pekerja merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan. Pada konteks pemerintahan, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi,

akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat. Selain itu, “komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan”. (Nouri & Parker, 1996).

Komitmen organisasi bisa tumbuh disebabkan karena individu memiliki ikatan emosional terhadap organisasi yang meliputi dukungan moral dan menerima nilai yang ada serta tekad dari dalam diri untuk mengabdikan pada organisasi. Berdasarkan definisi komitmen terhadap organisasi, dapat dikatakan bahwa komitmen merefleksikan tiga dimensi utama, yaitu: 1) Affective Commitment; 2) Normative Commitment; dan 3) Continuance Commitment. Sedangkan (Mowday & Richard T, 1979) mengelompokkan komitmen organisasi menjadi tiga yaitu: identifikasi yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi, keterlibatan yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan, loyalitas perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

2.1.8. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi adalah sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan

mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati (Andini, 2015).

Kompetensi SDM mencakup kapasitasnya yaitu kemampuan seseorang dalam suatu organisasi atau kelembagaan, untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangan dalam mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Ihsanti & Emilda (2014) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang dalam suatu organisasi atau suatu sistem untuk melakukan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Kompetensi SDM yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, berupa keterampilan dan pengetahuan khusus, sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan dapat meningkatkan laporan keuangan sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut (Sutrisno, 2009, h; 204-205) Indikator dari Kompetensi Sumber Daya Manusia terdiri dari :

- 1) Pengetahuan

Kesadaran dalam bidang kognitif. Karyawan harus mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.

- 2) Keterampilan

Keterampilan adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

3) Sikap

Perasaan (senang tidak senang, suka tidak suka) atau reaksi terhadap sesuatu yang datang dari luar. Misalnya, krisis ekonomi, kenaikan gaji dll.

2.2. Tinjauan Empiris

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Penelitian yang dilakukan oleh Nirwana & Haliah (2018) tentang determinan kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa faktor kompetensi SDM, regulasi, dan politik memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

Afri & Rizki (2018) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitian diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Aldino & Septiano (2021) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi, teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Padang.

Luky *et al.*, (2020) meneliti tentang pengaruh komitmen organisasi, pelaksanaan anggaran dan implementasi sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan.

Hasil penelitian (Furqan *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa secara umum kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan di sektor publik, ditemukan juga bahwa temuan pemeriksaan mempunyai dampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan dan kualitas pelayanan publik

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual

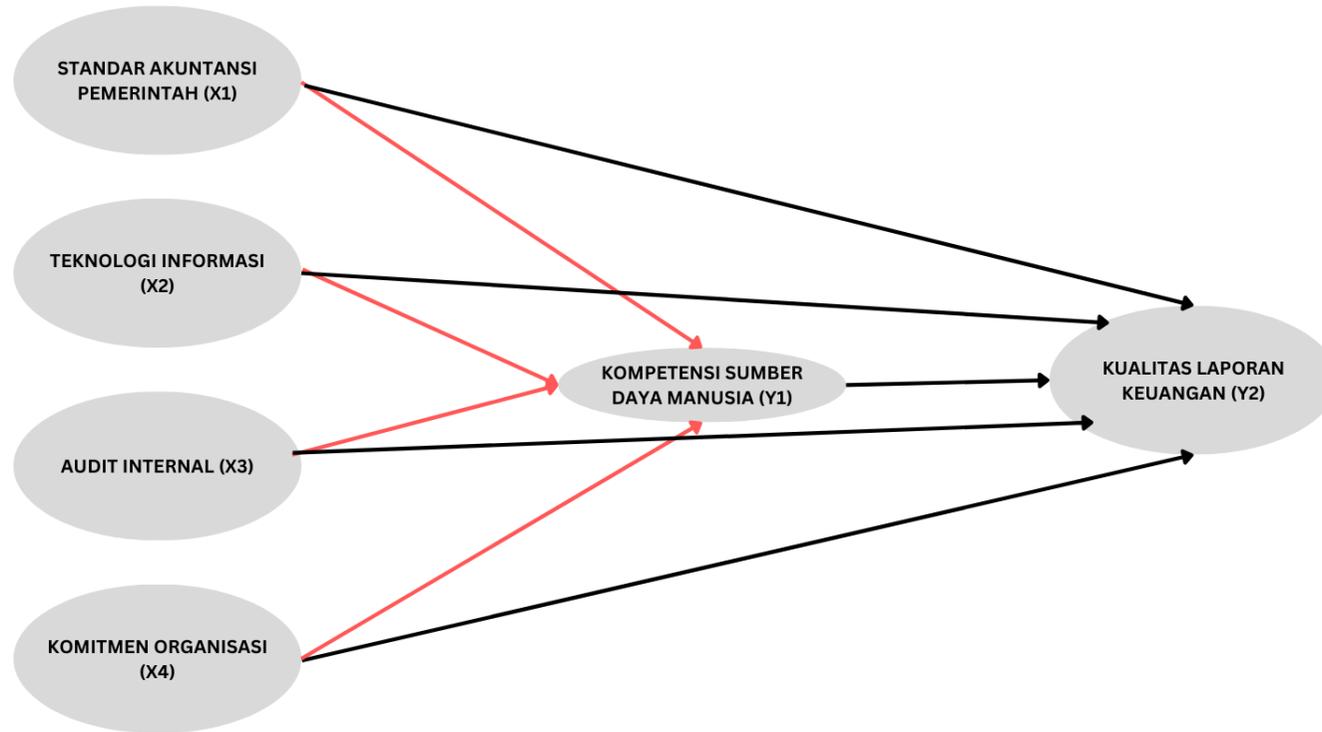
Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Hal ini diperlukan pada semua jenis penelitian untuk menentukan arah penelitian agar penelitian berfokus pada satu permasalahan. Kerangka konseptual ini disusun berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kerangka konseptual membahas tentang hubungan teori dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Suatu kerangka konseptual dikatakan baik apabila mampu menjelaskan studi teoritis maupun studi empiris. Studi teoritis yaitu teori-teori yang relevan dalam permasalahan dalam penelitian, sedangkan studi empiris yaitu hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Gabungan antara studi teoritis dan empiris dalam penelitian ini menghasilkan variabel-variabel penelitian. Variabel-variabel yang dimaksud adalah variabel *independen*, *dependen*, dan variabel *moderasi* yang akan membentuk hipotesis penelitian. Penelitian ini lakukan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan dengan sumber daya

manusia sebagai variabel moderasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *stewardship theory* dan *goal setting theory*.

Stewardship theory adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991: 49). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan antara organisasi pemerintah dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mensejahterakan masyarakat. Sedangkan *goal setting theory* atau teori penetapan tujuan adalah proses kognitif membangun tujuan dan merupakan determinan perilaku. Prinsip dasar *goal setting theory* adalah *goals* dan *intentions*, yang keduanya merupakan penanggung jawab untuk *human behavior*. Dalam studi mengenai *goal setting*, *goal* menunjukkan pencapaian standar khusus dari suatu keahlian terhadap tugas dalam batasan waktu tertentu.

Berdasarkan kedua teori yang telah dikemukakan diatas, gambaran menyeluruh penelitian ini yang menyangkut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disederhanakan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Keterangan:
→ Pengaruh langsung
→ Pengaruh tidak langsung

Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

3.2. Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka konseptual dan tinjauan teori, maka dikembangkan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut.

3.2.1. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Menurut PP No. 71/2010 tentang SAP yang dijelaskan dalam Pasal 1(3) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP mengacu pada kerangka kerja prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Stewardship theory sebagaimana dijelaskan oleh Donaldson & Davis (1991), menggambarkan bahwa manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan lebih fokus pada pencapaian tujuan utama, yaitu kepentingan organisasi. *Stewardship theory* menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam mencapai tujuan organisasi yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, harus memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi agar hasil *outputnya* lebih baik.

Penggunaan standar akuntansi cenderung diterapkan untuk meningkatkan sistem yang telah digunakan sebelumnya. Hal ini bertujuan agar informasi keuangan sebagai dasar laporan keuangan menjadi lebih akurat dan kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat dihindari. Pemahaman yang baik terhadap standar akuntansi

pemerintah akan menghasilkan kualitas yang andal dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan kata lain, laporan keuangan yang relevan dapat diperoleh melalui pemahaman yang baik terhadap akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian informasi yang lengkap agar tujuan organisasi dapat tercapai terutama dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahardini & Miranti (2018), dan Mutmainnah (2020) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, jika standar akuntansi pemerintah diterapkan dengan baik, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H1: Standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

3.2.2. Teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pemanfaatan Teknologi Informasi merujuk pada perilaku dan sikap akuntan dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas serta meningkatkan kinerjanya dalam organisasi. Organisasi merespon perkembangan teknologi informasi dengan merancang sistem informasi berbasis teknologi komputer atau situs web. Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan

penggunaan Teknologi Informasi oleh karyawan dalam suatu organisasi (Siahaya *et al.*, 2015).

Organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya, menerapkan *Stewardship theory* dalam pemanfaatan teknologi informasi. Teori ini menggambarkan hubungan yang erat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan sebuah organisasi dapat dicapai dengan memaksimalkan utilitas pihak utama (*principals*) dan manajemen. Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat membantu dalam penyampaian informasi dengan cepat, memastikan pekerjaan diselesaikan tepat waktu. Salah satu contoh pekerjaan yang terkait adalah pelaporan hasil kerja yang berkontribusi pada tercapainya kualitas laporan keuangan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah *et al.*, (2017), Baturante (2018), dan Sundari *et al.*, (2018) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H2: Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

3.2.3. Audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Peran Audit internal merupakan salah satu peran penting dalam perusahaan. Audit internal mempunyai peran strategis dalam membawa kepentingan perusahaan, bahkan mungkin pemegang

saham untuk memastikan setiap unit di dalam perusahaan berjalan dengan baik. *Stewardship theory* sebagaimana dijelaskan oleh Donaldson dan Davis (1991), menggambarkan bahwa manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan lebih fokus pada pencapaian tujuan utama, yaitu kepentingan organisasi.

Keterlibatan audit internal mengarahkan pada lingkungan yang lebih terkontrol dan memeriksa kemungkinan terjadinya kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Peran Audit internal dalam pemeriksaan dan pengawasan keandalan laporan keuangan akan meminimalisir kesalahan sehingga akan meningkatkan kualitas Pelaporan Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Udiyanti *at al.*, (2014) dan Putri M & Triandi T (2020) menyatakan bahwa peran audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya, semakin baiknya keterlibatan Auditor Internal dalam pemeriksaan dan pengawasan keandalan laporan Keuangan akan meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan. Keterlibatan peran audit internal dalam proses pelaporan keuangan menghasilkan transparansi yang lebih tinggi pada operasi perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H3: Audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

3.2.4. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Komitmen Organisasi merupakan tingkat keyakinan sejauh mana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut (Robbins & Judge, 2008). Aparatur pemerintahan diharapkan dapat memberikan kinerja yang baik kepada pemerintah sehingga dalam pembuatan laporan keuangan diharapkan bersungguh sungguh untuk memajukan organisasi tersebut.

Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas principals dan manajemen. *Stewardship theory* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. Aparatur yang mementingkan kepentingan diri sendiri dan tidak mementingkan kepentingan organisasi merupakan bentuk konflik yang terjadi dalam sebuah kinerja aparatur pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, perlu komitmen organisasi yang tinggi untuk menghasilkan profesionalisme kinerja pemerintahan yang berkualitas sehingga dapat memberikan laporan keuangan pemerintah yang dapat diandalkan oleh pengambil keputusan pihak (principal). Komitmen yang tinggi dari pegawai akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai informasi yang akuntabel (Yuliani *et al.*, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Iminanda *et al.*, (2018), Tampubolon *et.al.*, (2018), dan Mariana & Basid, (2019) menunjukkan

bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H4: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

3.2.5. Kompetensi sumber daya manusia memediasi pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Stewardship theory menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki eksistensi sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, para stewards (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan mereka agar dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

Untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten didukung oleh latar belakang pendidikan yang memadai, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta memiliki pengalaman di bidang keuangan. Apabila sumber daya manusia memiliki kompetensi yang baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas. Namun, jika sumber daya manusia tidak kompeten, kualitas laporan keuangan dapat dipertanyakan.

Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Kiranayanti & Erawati, (2016), Tanjung Hariani & Indrastuty, (2016) , Alamsyah *et al.*, (2017), Baturante *et al.*, (2018) yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia secara konsisten berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, selain daripada pemahaman terhadap SAP adapun faktor lain yang tidak bisa dikesampingkan yaitu kompetensi dari sumber daya manusia itu sendiri. Dalam penelitian ini diharapkan kompetensi SDM mampu memperkuat atau memoderasi variabel pemahaman SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H5: Kompetensi sumber daya manusia memediasi pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

3.2.6. Kompetensi sumber daya manusia memediasi pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Dalam menyusun laporan keuangan diperlukan pemanfaatan teknologi yang baik, sebab dengan memanfaatkan teknologi informasi akan memperkecil kemungkinan munculnya kesalahan (Paramitha & Dharmadiaksa, 2019). Pemanfaatan teknologi informasi harus didukung dengan pegawai atau sumber daya manusia yang mampu

menjalankan aplikasi dan memahami teknologi informasi yang diterapkan, hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas pembuatan laporan keuangan.

Menurut *Stewardship theory*, Pemerintah Daerah dianggap sebagai sebuah lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan akurat. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab ini, para stewards (manajemen dan auditor internal) mengarahkan segala kemampuan mereka untuk menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas. Untuk mencapai laporan keuangan berkualitas, penting untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten dengan latar belakang pendidikan yang memadai, aktif mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta memiliki pengalaman di bidang keuangan. Keberhasilan dalam hal kompetensi sumber daya manusia ini akan tercermin dalam laporan keuangan yang baik. Sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak kompeten, kualitas laporan keuangan dapat dipertanyakan

Sumber daya manusia di setiap organisasi harus mampu memperbaharui kompetensinya melalui pelatihan atau pembelajaran mandiri, sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, maka akan semakin cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi di bidang akuntansi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan

informasi dan laporan keuangan yang optimal, berkualitas, dan disampaikan tepat waktu.

Dalam penelitian Mahayani *et al.*, (2017), disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Karuniawan *et al.*, (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kesimpulan tersebut konsisten dengan penelitian Agustiawan dan Rasmini (2016), yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh positif terhadap pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H6: Kompetensi sumber daya manusia memediasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

3.2.7. Kompetensi sumber daya manusia memediasi pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Audit internal merupakan aktivitas yang independen, penilaian objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai serta meningkatkan operasi organisasi. Pelaksanaan audit internal dilakukan secara independen dan objektif, yang berarti tidak terpengaruh oleh

pihak manapun dalam proses audit. Audit internal harus bebas dari hambatan dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas audit internal adalah untuk membantu organisasi meningkatkan pengendalian internal perusahaan, termasuk pengendalian penjualan, memberikan dukungan kepada seluruh anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab, dan memberikan pendapat objektif mengenai kegiatan yang telah diperiksa. Keberhasilan peran audit internal dalam organisasi atau perusahaan harus didukung oleh pegawai atau sumber daya manusia yang kompeten, dengan latar belakang pendidikan yang memadai, aktif mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki pengalaman di bidang keuangan.

Stewardship theory sebagaimana dijelaskan oleh Donaldson dan Davis (1991), menyatakan bahwa eksistensi Pemerintah Daerah adalah sebuah lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan akurat. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, para stewards (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan mereka untuk menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas. Agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten didukung dengan latar belakang pendidikan yang memadai, aktif mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta memiliki pengalaman di bidang keuangan.

Penelitian yang dilakukan Zebua *et al.*, (2020) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Evicahyani (2016) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Gambaran ini menyatakan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang ada, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan juga semakin baik.

H7 : Kompetensi sumber daya manusia memediasi pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

3.2.8. Kompetensi sumber daya manusia memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Komitmen Organisasi merupakan suatu tingkat keyakinan sejauh mana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut (Robbins & Judge, 2008). Aparatur pemerintahan diharapkan dapat memberikan kinerja yang baik kepada pemerintah sehingga dalam pembuatan laporan keuangan diharapkan bersungguh-sungguh untuk memajukan organisasi tersebut.

Menurut *goal setting theory* yang dikembangkan oleh Locke sejak 1979, individu memiliki beberapa tujuan, memilih tujuan, dan mereka termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam konteks

pemerintahan daerah, pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang baik akan mencapai tujuan dari suatu organisasi terutama dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, harus didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang baik sebagai pegawai.

Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan maka akan memperkuat komitmen organisasi pegawai sehingga menumbuhkan idealisme terhadap diri seorang pegawai, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal terutama dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Iminanda *et al.*, (2018), Tampubolon *et al.*, (2018), dan Mariana & Basid, (2019) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan (2012) menyampaikan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat memperkuat komitmen organisasi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H8 : Kompetensi sumber daya manusia memediasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.